

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), 2020
- _____, Asshiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang, Cet. I*, (Jakarta: Konstitusi Press), 2006
- _____, Asshiddiqie Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat. Edisi I. Cet. 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007
- Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia), 2010
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya hukum Pidana, Edisi I. Cet. 8*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014
- Indrati Farida Maria S, *Ilmu Perundang-undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Edisi Revisi*, (Yogyakarta: PT. Kanisius), 2020
- _____, Indrati Maria Farida Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 2; Proses dan Teknik Penyusunan. Edisi Revisi*. (Yogyakarta: PT. Kanisius), 2020
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), 2005
- Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih “ *Ilmu Negara*” (Jakarta : Gaya Media Pratama Jakarta), 2014

Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Cet.3, (Jakarta: KENCANA), 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun
2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keungan untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keunagan”.

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Perpres No. 87 Tahun 2014, LN No. 199 Tahun 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Sumber lainnya

Auliya Khasanofa, *Kedudukan Perppu Ormas Dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Replik, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/922/584>, Volume 5 No. 2, 2017

Ali Marwan Hsb. 2017, *Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/71>, Volume 14 Nomor 1, 2017

Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti “*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran,

<https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14776/7045>, Volume 4
Nomor 2, 2017

Evlyn Martha Julianthy., *Limitasi Materi Muatan Ketetapan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/657> , Vol 17, No. 4, 2020

Fitra Arsil, *Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1593/1470>, Volume 48 Nomor 1, 2018

Gelar Ali Ahmad dan Yazid Bustomi. *Urgensi Kriminalisasi Kemepilikan Perolehan dan Penggunaan Airsoft Gun Tanpa Izin*, Artikel dalam “Jurnal Novum”, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/38693>, No. 1. Vol. 1, 2012

Osgar S. Matompo, *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat*, Jurnal Media Hukum, <https://journal.umsida.ac.id/index.php/jmh/article/view/1157/1229>, Vol. 21, No. 1, 2014

Ricca Anggraeni & Indah Mutiara Sari, *Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu*

Norma Hukum, Jurnal Crepindo,
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/7895>, Vol.
02, No. 01, 2020

Suhariyono AR. *Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Artikel dalam “Perspektif”, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/91/0>, No. 1. Vol. 17, 2012

Sonata Lukman, *Politik Hukum Legislasi Dalam Perumusan Ketentuan Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2021

Rofiq Hidayat, *Mengupas Legalitas Aturan Sanksi Pidana dalam Perppu*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengupas-legalitas-aturan-sanksi-pidana-dalam-perppu-lt59a7bab284670>, 2017

Titis Anindyajati dkk, *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Konstitusi, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/12410>, Volume 12 Nomor 4, 2015

Fitra Arsil. 2018. *Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Volume 48 Nomor 1, hlm. 18

Reza Fikri Febriasyah, *Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sitem Norma Hukum Negara Republik Indonesia*, Artikel dalam Jurnal Legislasi Indonesia, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/338>, No. 4. Vol. 6, 2009